

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa berkembangnya desentralisasi pemerintahan, manajemen keuangan di wilayah daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahannya melalui pelimpahan kewenangan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah (Meilda Ellysa Putri1 2015).

Dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap Dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menjalankan proses pengembangan wilayah dan penyediaan layanan publik secara optimal dengan mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (Puspitasari et al. 2019).

Menurut Zenritami (2021) Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah pasca-otonomi daerah. Pendapatan ini sangat penting bagi pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Menurut Oktavia (2023) Pajak daerah dan Retribusi Daerah diartikan sebagai pembayaran wajib individu maupun badan hukum yang membayar ke pemerintah daerah yang dikenakan tindakan paksa menurut perundangan dan dialokasikan untuk pemenuhan persyaratan regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.. Sedangkan, Retribusi daerah merupakan biaya untuk layanan kota yang menguntungkan masyarakat. Pajak dan retribusi diatur oleh Undang-Undang No. 34 tahun 2000, yang mengubah Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Daerah (selanjutnya disebut UU Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah).

Di antara berbagai sumber pendapatan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap paling menjanjikan karena sepenuhnya dapat dikendalikan

oleh pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya. Variasi penerimaan antar daerah mencerminkan perbedaan dalam potensi ekonomi yang dimiliki setiap wilayah (Meilda Ellysa Putri1 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan belanja modal. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Adolph, (2016) mengartikulasikan belanja modal sebagai komponen anggaran pemerintah yang menghasilkan aset tetap, selaras dengan pernyataan Nurdiwaty, Zaman, and Kristinawati (2017) bahwa pengeluaran tersebut sangat penting untuk mencapai otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan dan layanan masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan infrastruktur fisik, tetapi juga memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keduanya menunjukkan bahwa investasi dalam belanja modal memegang peranan krusial dalam menjamin kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana yang diterima dari pusat, sehingga dapat lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran. Ketika pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan pajak dan retribusi, mereka dapat meningkatkan kapasitas belanja modal, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif menjadi kunci untuk mendanai belanja modal dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan meskipun terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah, alokasi belanja modal tidak menunjukkan pertumbuhan yang sepadan. Hal ini menyebabkan akumulasi aset tetap daerah tidak berkembang secara maksimal, lantaran sebagian

besar PAD terserap untuk membiayai belanja operasional dan belanja lainnya.

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, realitas di lapangan mengindikasikan adanya ketimpangan antara peningkatan pendapatan dan alokasi belanja modal. Secara teoritis, peningkatan PAD terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya mendorong peningkatan belanja modal guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, fenomena yang terjadi justru sebaliknya sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional dan belanja rutin, sementara belanja modal cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan secara proporsional terhadap total APBD.

Data realisasi APBD Kalimantan Timur tahun 2023 memperjelas fenomena ini. Meskipun pendapatan daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp17,75 triliun (94,97%) dari target, realisasi belanja hanya mencapai 48,76% dari pagu anggaran. Ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan fiskal, terutama dalam alokasi untuk pengeluaran yang bersifat produktif seperti belanja modal. Padahal, belanja modal memiliki peran strategis dalam menciptakan aset tetap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

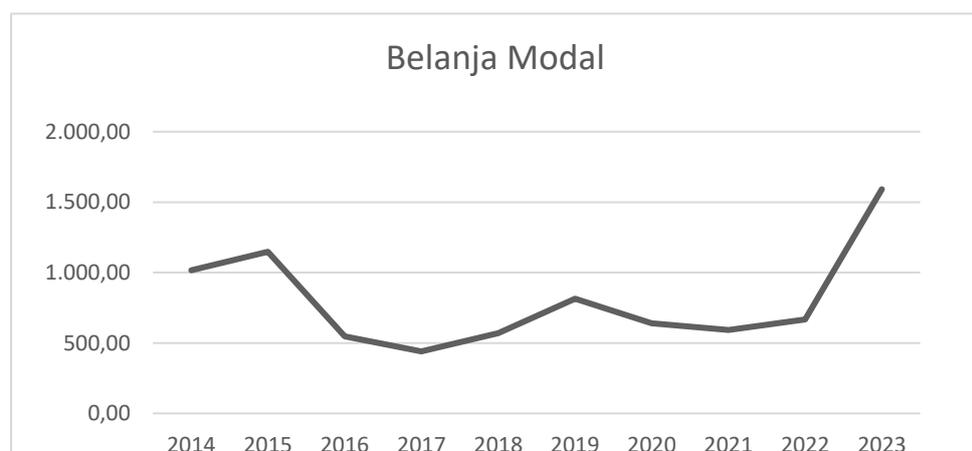
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam konteks pemanfaatan PAD yang belum optimal untuk tujuan pembangunan jangka panjang. Terlebih lagi, Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar serta pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi secara nasional (6,84% yoy Triwulan II 2023), sehingga rendahnya alokasi belanja modal justru menjadi anomali yang perlu dikaji lebih dalam.

Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih relatif tinggi, padahal otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mandiri secara fiskal. Dengan kata lain, kenaikan PAD belum sepenuhnya mencerminkan

peningkatan kapasitas fiskal daerah, karena belum mampu menggeser alokasi belanja dari kegiatan konsumtif ke arah investasi pembangunan jangka panjang. Inilah yang menjadi titik krusial yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini.

Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi, menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, yang berperan sebagai salah satu komponen utama dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Adolph 2016b)

Pengeluaran modal menjadi elemen vital dalam manajemen keuangan daerah yang berfungsi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Di Provinsi Kalimantan Timur, peningkatan belanja modal sangat diperlukan untuk untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan standar hidup. Meskipun demikian, kemanjuran pengeluaran tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh sumber pendanaan yang tersedia, termasuk pajak daerah, pungutan regional, dan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ketiga variabel ini mempengaruhi belanja modal di provinsi tersebut.



Gambar 1. 1 Perkembangan belanja modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

Sumber : Djpk.kemenkeu.co.id

Berdasarkan data belanja modal dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang ditampilkan dalam gambar, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2014–2023. Rata-rata belanja modal menurun dari Rp1.015,26 miliar pada tahun 2014 menjadi hanya Rp440,43 miliar di tahun 2017. Namun, tren ini kembali meningkat secara bertahap, mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp1.591,68 miliar. Grafik yang ditampilkan memperlihatkan pola naik-turun yang tajam, mencerminkan ketidakstabilan dalam kebijakan alokasi belanja modal dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat, alokasi untuk belanja modal belum konsisten setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran masih terserap pada belanja operasional dan bukan pada pembangunan aset tetap yang mendukung pelayanan publik. Dengan kata lain, terdapat potensi belum optimalnya pemanfaatan PAD untuk investasi jangka panjang.

Dengan demikian, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2023 mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif untuk pembangunan. Kondisi ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan alokasi anggaran. Dengan adanya perubahan kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi yang cepat, analisis mendalam terkait dampak pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal menjadi sangat krusial untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat bagi pemerintah daerah. Kajian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara ketiga variabel tersebut dengan belanja modal di Provinsi Kalimantan Timur

Pentingnya studi ini terletak pada upaya untuk memahami seberapa besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019–2023. Dengan menganalisis hubungan antara ketiga variabel ini, studi ini diupayakan mampu menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai strategi pengelolaan fiskal yang efisien untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di provinsi ini.

Melalui pendekatan analitis yang komprehensif, studi ini tidak sekadar mengungkap elemen-elemen yang berdampak terhadap belanja modal, tetapi juga untuk menyusun usulan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, Temuan studi ini diharapkan dapat sangat meningkatkan pengembangan kebijakan publik di Kalimantan Timur.

Studi ini memiliki beberapa kesamaan dengan studi sebelumnya yang disebutkan dalam teks. Kesamaan utamanya terletak pada fokus terhadap pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah dalam mendukung pembangunan daerah, sebagaimana disampaikan oleh (Meilda Ellysa Putri1 2015), (Puspitasari et al. 2019), dan (Zenritami 2021). Seluruh penelitian tersebut menekankan bahwa PAD, yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, merupakan fondasi utama bagi kemandirian fiskal daerah serta pembangunan infrastruktur melalui belanja modal. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti bahwa optimalisasi PAD berpotensi menurunkan ketergantungan pemerintah daerah pada alokasi dana dari pemerintah pusat dan mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan. Adapun kesamaan pandangan dengan (Adolph 2016) serta (Nurdiwaty, Zaman, and Kristinawati 2017) adalah pada pentingnya belanja modal sebagai sarana strategis untuk menciptakan aset tetap yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan otonomi daerah.

Di sisi lain, perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada konteks wilayah dan waktu kajian yang lebih spesifik, yaitu di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019–2023. Penelitian ini juga memanfaatkan data terkini dari realisasi APBD dan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah. Selain menyoroti peran penting pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, penelitian ini mengangkat isu ketidakseimbangan antara peningkatan PAD dan realisasi belanja modal

yang belum optimal. Tambahan konteks yang memperkuat urgensi penelitian ini adalah dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, di mana perekonomian nasional dan daerah mengalami kontraksi besar, sehingga fokus pemerintah saat itu lebih pada penanggulangan kesehatan dan perlindungan sosial daripada pembangunan fisik. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, pemerintah daerah mulai beralih ke fase pemulihan ekonomi, di mana kebijakan fiskal diarahkan kembali untuk membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, dan memperkuat pelayanan publik, yang semuanya sangat membutuhkan belanja modal yang kuat dan terarah. Oleh karena itu, analisis hubungan antara PAD, pajak, retribusi, dan belanja modal selama periode tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga mengisi kekosongan dalam literatur dengan memberikan analisis kontekstual dan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di Kalimantan Timur.

Dalam kajian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada hubungan PAD dan belanja modal dalam konteks nasional atau provinsi secara umum, tanpa mengkaji lebih dalam dinamika fiskal antar kabupaten/kota secara spesifik di Kalimantan Timur. Selain itu, sebagian besar studi tidak memperhitungkan ketimpangan antara realisasi PAD yang tinggi dengan tingkat realisasi belanja modal yang relatif rendah dan tidak proporsional, sebagaimana terlihat dalam data APBD Kalimantan Timur tahun 2023.

Celah lain yang belum banyak dijelaskan dalam studi sebelumnya adalah fluktuasi belanja modal tahunan yang sangat tajam, serta belum adanya studi kuantitatif terkini yang menguji secara simultan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD terhadap belanja modal secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota dalam lingkup provinsi ini. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan kuantitatif asosiatif dan data lima tahun terakhir, sehingga mampu

memberikan gambaran empiris dan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi Kalimantan Timur.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah menekankan pentingnya PAD, pajak daerah, dan retribusi dalam mendukung belanja modal, studi-studi tersebut belum secara spesifik mengungkap dinamika fluktuasi belanja modal yang ekstrem di tingkat kabupaten/kota, seperti yang tampak dalam data Kalimantan Timur.

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.1 rata-rata belanja modal di Kalimantan Timur selama periode 2014–2023 mengalami fluktuasi tajam, dengan penurunan signifikan di tahun 2016 dan 2017, kemudian lonjakan tinggi pada tahun 2023. Ketidakteraturan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi PAD yang dimiliki dan pengalokasian anggaran belanja modal yang optimal.

Dengan kata lain, meskipun PAD meningkat, grafik menunjukkan bahwa belanja modal tidak mengikuti pola yang konsisten atau proporsional. Fluktuasi ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks lokal Kalimantan Timur, khususnya dengan pendekatan kuantitatif dan periodisasi pasca-pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan data terbaru dan analisis menyeluruh terhadap pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD terhadap belanja modal.

Studi ini menerapkan teknik kuantitatif asosiatif untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019–2023. Data yang digunakan bersifat numerik dan diperoleh dari sumber sekunder resmi. Studi ini menggunakan beberapa regresi linier di samping uji-t, uji-F, dan R^2 untuk mengeksplorasi hubungan variabel dan pengaruh baik sebagian maupun bersamaan.

B. Rumusan Masalah

Rumus masalah untuk studi saat ini ditetapkan berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh dari Pajak Daerah secara parsial terhadap Belanja

Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023?

2. Apakah pengaruh dari Retribusi Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023?
3. Apakah pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023?
4. Apakah terdapat pengaruh ketiga variabel (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah) secara simultan terhadap Belanja Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan studi diuraikan di bawah ini:

1. Untuk menganalisis apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023.
2. Untuk menganalisis apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023.
3. Untuk mengevaluasi apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023.
4. Untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh ketiga variabel (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah) terhadap Belanja Modal Pada Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya studi saat ini dapat dilihat dari beberapa sisi, baik dari masyarakat maupun sisi pemerintah dan akademik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Manfaat untuk Akademik
 - a. Studi ini akan menambah kajian literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks pajak daerah dan retribusi.
 - b. Temuan dalam studi ini bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat mengeksplorasi topik serupa atau aspek lain dari keuangan daerah.
 - c. Studi ini juga dapat memberikan kontribusi metodologis dalam analisis data keuangan daerah, serta memperkenalkan pendekatan baru dalam mengevaluasi hubungan antara sumber pendapatan dan belanja modal.

2. Manfaat Praktis

- Manfaat untuk Masyarakat
 - a. Dengan memahami pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal, studi ini berpotensi memberikan dukungan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara lebih efektif. Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan mutu layanan publik yang dinikmati oleh masyarakat
 - b. Studi ini dapat memberikan dasar bagi kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan yang lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota atau Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. Hasil penelitian dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengawasan dan partisipasi dalam pembangunan daerah, sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.
- Manfaat untuk Pemerintah

- a. Penelitian ini menyediakan data dan analisis yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan pajak dan retribusi, serta alokasi belanja modal.
- b. Dengan mengetahui pengaruh masing-masing sumber pendapatan terhadap belanja modal, pemerintah dapat mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, sehingga meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
- c. Studi ini dapat menghasilkan saran kebijakan yang lebih tepat untuk manajemen keuangan daerah, terutama mengenai prioritas belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016a. "PENGARUH PENDAPATAN DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) Oleh." : 1–23.
- . 2016b. "濟無No Title No Title No Title." : 1–23.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Belanja Daerah." *Universitas Atma Jaya* (July): 1–23.
- Andi Ernawati Da Costa dan Muhammad Halim. 2020. "KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO." (32): 1–17.
- Asmawiah, Hajar siti, and Hary Sulistiyo. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2020." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(1 SE-Articles of Research): 4150–57. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3518>.
- Asrulla, Risnita, M. S Jailani, and Firdaus Jeka. 2023. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3): 26320–32.
- BPK 2010. 2010. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)." <http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.
- Dairse. 2009. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH." *Экономика Региона* (Kolisch 1996): 49–56.
- Ekonomi, Jurnal, Keuangan dan Bisnis, and Universitas Tidar Magelang. 2020. "EKOMBIS Sains Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018 Nurul Annisa Fajrianti." 5: 45–54.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. 2017. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Ekometrika Dengan Eviews 10*.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya. 2020. 5 *Revista Brasileira de Linguística Aplicada Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Khusaini, M. 2018. *Keuangan Daerah*. UB Press. <https://books.google.co.id/books?id=VOmIDwAAQBAJ>.
- Meilda Ellysa Putri1, Sri Rahayu2. 2015. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution On." *Jurnal e-Proceeding of Management* 2(1): 281–88.
- Murti, Sonia, and Rina Trisnawati. 2021. "Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, Dan DAK Pada Belanja Modal." *Perspektif Akuntansi*

4(2): 105–19.

- Nurdiwaty, Diah, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati. 2017. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur.” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 17(1): 43–59.
- Oktavia, Bela Rafti. 2023. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.*
- Puspitasari, Endah, Sari Purnama, Elis Badriah, and Kartika Risna. 2019. “Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?” *JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi* 7(1): 37–48.
- Putra, Sazka Ricky Yulandra. 2022. “BELANJA MODAL SEKABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI.”
“Ringkasan-Apbd-Tahun-2021-2023.”
- Safitri, Rista Dwi Wulan. 2021. “Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Tulungagung Tulungagung.”
- Zenritami, Salma Labita. 2021. “ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012-2020.”
- Ghozali, Imam. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Diunduh 20 Desember 2024
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta. Diunduh 20 Desember 2024